

**IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* UNTUK MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-14 DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh :

VINZA RIZQIE PUTRA PRIYONO

20410634

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TAHUN AJARAN 2023/2024

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Konsep Ekonomi Biru untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-14 : Life Below Water di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami apakah Ekonomi Biru dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai SDGs ke-14 di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan internasional serta apa saja tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Dari penelitian ini, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, konsep Ekonomi Biru dapat mewujudkan SDGs ke-14 dalam perspektif hukum lingkungan internasional dan juga menjadi sebuah potensi sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh wilayah pesisir dan pulau-pulau Indonesia. Kedua, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam implementasi Ekonomi Biru, namun juga memberikan peluang yang signifikan dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut yang besar dengan Ekonomi Biru untuk mewujudkan SDGs ke-14

Kata kunci : Ekonomi Biru, Negara Kepulauan, Peluang, Sustainable Development Goals, Tantangan

ABSTRACT

This research focuses on the Implementation of Blue Economy concept to actualize the 14th Sustainable Development Goals: Life Below Water in Indonesia from the Internasional Environmental Law Perspective. The purpose of this study is to analyze and understand whether the Blue Economy concept can be used as an instrument to achieve the 14th SDGs in Indonesia from the Internasional Environmental Law Perspective and also to find out what are the challenges and opportunities that exist in implementing the Blue Economy concept in Indonesia. The research is a type of normative research, while the approaches that are used in the reserach are statutory, conceptual, and historical. From this research, two conclusions can be drawn. First, the Blue Economy Concept can actualize the 14th SDGs from the Internasional Environmental Law Perspective and also has the potential to be an effective and comprehensive solution to overcome the problems faced by Indonesia's coastal areas and islands. Second, Indonesia faces complex challenges in implementing the Blue Economy concept, yet also provides significant opportunities in exploiting the potential of large marine resources with the Blue Economy concept to actualize the 14th SDGs.

Keyword : Archipelago State, Blue Economy, Challenges, Potentials, Sustaniable Development Goals

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis yang khas. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di seluruh kepulauan nusantara, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Potensi maritim Indonesia yang sangat luar biasa, dengan lebih dari 80 ribu kilometer garis pantai, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan akses laut yang melimpah.² Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudera yang penting, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik, membuatnya sebagai pusat lalu lintas maritim global. Keanekaragaman hayati laut Indonesia juga sangat kaya, dengan berbagai spesies laut dan ekosistem yang mencakup terumbu karang, mangrove, dan perairan yang sangat produktif.³

Sehubungan dengan upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, konsep *Blue Economy* (selanjutnya disebut Ekonomi Biru) telah mengemuka sebagai model baru. Ekonomi Biru mengusung ide bahwa eksploitasi sumber daya laut dapat berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan, asalkan dilakukan secara berkelanjutan dan bijaksana. Indonesia, dengan kekayaan laut yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan Ekonomi Biru secara efektif.

¹ E Djunarsjah dan AP Putra, *The concept of an archipelagic Province in Indonesia*, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 777 012040, Tahun 2021. Hlm. 2.

² Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Peta Tematik. Diakses dari <https://www.big.go.id/peta-tematik/pantai> pada 23 September 2023.

³ Veron, J. E. N., & Stafford-Smith, M, *Corals of the World*. Australian Institute of Marine Science, 2000.

Kekayaan sumber daya laut Indonesia sangat mencolok. Lautan Indonesia menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut lainnya yang menjadi sumber utama protein hewani bagi penduduk pesisir. Ekosistem terumbu karang berperan penting dalam menjaga biodiversitas dan mendukung sektor pariwisata, sementara potensi sumber daya mineral di dasar laut menawarkan peluang dalam pengembangan sektor pertambangan laut. Pesisir Indonesia yang memanjang merupakan sumber daya alam yang vital untuk kehidupan masyarakat lokal serta menjadi daya tarik wisata yang mendunia.⁴

Semua potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-14, yang berfokus pada “*Life Below Water*” atau kehidupan di bawah air untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, oseanografi, serta ekosistem laut dan pesisir. *SDGs* ke-14 merupakan perwujudan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development principle*. Prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah upaya sadar dan terencana untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁵

⁴ Universitas Islam AN-Nur Lampung, *Sumber Daya Kelautan Indonesia : Potensi, Manfaat, dan Tantangan*, dikutip dari <https://an-nur.ac.id/blog/sumber-daya-kelautan-indonesia-potensi-manfaat-dan-tantangan.html> , diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 17.40.

⁵ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Pembangunan Berkelanjutan*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>

Tujuan *SDGs* ke-14 tersebut mencakup upaya untuk mengurangi polusi laut, memperkuat kapasitas pengelolaan perikanan, mempromosikan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.⁶ Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah memiliki peran penting dalam mencapai *SDGs* ke-14. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai tujuan ini antara lain terkait dengan pengelolaan perikanan yang belum optimal, perubahan iklim, dan polusi laut.⁷

Namun, walaupun Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam ekonomi laut, tantangan-tantangan yang dihadapi juga besar.⁸ *Overfishing* berpotensi mengancam mata pencaharian jutaan nelayan di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pengelolaan perikanan yang lebih ketat dan berkelanjutan.⁹

Tantangan lainnya adalah degradasi ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang yang kaya di Indonesia juga menghadapi ancaman serius. Studi oleh Hughes menunjukkan bahwa pemanasan global telah menyebabkan peristiwa pemutihan karang berulang di seluruh dunia. Ini mengakibatkan kerusakan besar pada ekosistem terumbu karang Indonesia yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati laut. Terumbu karang

⁶ Judianto dan Yessy Eka, *Makalah Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman Goals 14 Ekosistem Laut*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021. Hlm. 26-27.

⁷ Yuliani, et. al, *Analisis Konten "Blue Economy" Pada Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP*, Jurnal Pendidikan IPS Vol. 13 No. 1, 2023. Hlm. 133.

⁸ Pauly, D., & Zeller, D. *Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining*. Nature Communications, 2016, Vol 7. No. 10244.

⁹ Teh, L. S. L., & Sumaila, U. R. *Contribution Of Marine Fisheries To Worldwide Employment*. Fish and Fisheries, Vol. 14 No. 1, 2013. Hlm. 77-88.

memiliki peran sentral dalam ekosistem laut, termasuk menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan yang penting bagi sektor perikanan. Degradasi terumbu karang dapat berdampak negatif pada produktivitas perikanan dan pariwisata.¹⁰

Kemudian terdapat juga polusi lingkungan laut, termasuk polusi plastik, merupakan tantangan lain yang harus diatasi di Indonesia. Studi oleh Jambeck, menemukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi signifikan terhadap masalah polusi plastik laut global. Limbah plastik yang berakhir di laut dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan kehidupan laut.¹¹ Penumpukan sampah plastik di laut adalah masalah yang sangat serius. Permasalahan tersebut memiliki dampak jangka panjang pada lingkungan laut. Polusi plastik juga dapat merusak sektor pariwisata pantai yang menjadi salah satu pilar ekonomi laut Indonesia.¹²

Penyebab dari tantangan-tantangan tersebut, salah satunya adalah perubahan iklim yang telah memberikan dampak signifikan pada ekosistem laut Indonesia. Peningkatan suhu permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim telah memicu peristiwa pemutihan karang secara massal di seluruh dunia, termasuk di perairan Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan stres pada terumbu karang, yang pada gilirannya menyebabkan degradasi ekosistem laut. Para ilmuwan juga mencatat bahwa perubahan suhu laut yang

¹⁰ Hughes, T. P., et al. *Global warming and recurrent mass bleaching of corals*. Nature Journal Vol. 543 No. 7645. 2017. Hlm. 373-377.

¹¹ Jambeck, J. R., et al., *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean*. Science, Vol. 347 No.6223, 2015. Hlm. 768-771.

¹² Law, K. L., et al. *Plastic Accumulation In The North Atlantic Subtropical Gyre*. Science, Vol 329 No.5996, 2010. Hlm. 1185-1188.

cepat dapat mengubah pola migrasi dan distribusi ikan, mempengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan.¹³

Selain itu, peningkatan suhu laut juga mempercepat proses pengasaman laut, yang mengancam organisme laut dengan kerangka kalsium, termasuk terumbu karang. Perubahan iklim juga telah meningkatkan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, seperti badai tropis dan gelombang panas laut, yang dapat menghancurkan habitat laut dan mengganggu keberlanjutan perikanan.¹⁴

Perubahan iklim dan dampaknya sebenarnya sudah lama menjadi isu global yang mendapat perhatian dari banyak pihak. Pada 1992, ditandatangani sebuah perjanjian global oleh 197 negara, yakni adalah *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Perjanjian ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan perjanjian global pertama yang secara detail membahas perubahan iklim dan mengakui adanya ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem bumi.¹⁵

Pada tahun 1995, negara anggota *UNFCCC* memulai negosiasi untuk memperkuat respons global terhadap perubahan iklim, dan pada 1997 diadopsilah *Kyoto Protocol* (Protokol Kyoto).¹⁶ Protokol Kyoto merupakan

¹³ The Nature Conservancy, *Kenaikan Permukaan Laut*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://reefresilience.org/id/stressors/climate-and-ocean-change/sea-level-rise/>

¹⁴ The Nature Conservancy, *Ibid.*

¹⁵ The London School of Economics and Political Science, *What is the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)?*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-un-framework-convention-on-climate-change-unfccc/>

¹⁶ United Nations Climate Change, *History of the Convention*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention#Essential-background>

perjanjian global kedua dan baru mulai berlaku pada tahun 2005 hingga 2012. Perjanjian ini menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Namun, perjanjian ini tidak mengikat negara-negara berkembang, termasuk negara-negara dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi seperti Tiongkok dan India. Selain itu, beberapa negara maju penghasil emisi terbesar seperti Amerika Serikat dan Australia tidak meratifikasi perjanjian ini. Hal tersebut yang menyebabkan kegagalan Protokol Kyoto dalam mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.¹⁷

Kemudian pada tahun 2015, ditandatangani Paris *Agreement* atau Persetujuan Paris yang merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh 195 negara, termasuk Indonesia. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat *Celsius* di atas level pra-industri dan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat *Celsius*. Paris *Agreement* juga menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca bagi semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Perjanjian ini dianggap sebagai tonggak sejarah karena merupakan perjanjian global pertama yang diikuti oleh hampir semua negara di dunia.¹⁸

Jika dilihat dari perspektif hukum lingkungan Internasional, Indonesia sebagai negara anggota Paris *Agreement* juga merupakan anggota dari

¹⁷ Council on Foreign Relations, *Global Climate Agreements: Successes and Failures*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.cfr.org/background/paris-global-climate-change-agreements>

¹⁸ Siaran Pers, *Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim*, diakses pada 15 Oktober 2023 dari https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) tahun 1982 yang memiliki kedaulatan atas zona ekonomi eksklusifnya, termasuk sumber daya alam di laut. Pasal 194 *UNCLOS* menjelaskan bahwa segala tindakan yang perlu sesuai dengan konvensi untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan laut sesuai kemampuan mereka.¹⁹ Kemudian dalam hal perlindungan keberagaman hayati laut, Indonesia juga merupakan negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) tahun 1994, yang menegaskan komitmen global untuk melindungi biodiversitas laut. Integrasi prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa implementasi Ekonomi Biru di Indonesia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan bawah air, sesuai dengan komitmen hukum yang telah diakui oleh negara ini baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁰

Sedangkan dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menegaskan tanggung jawab Negara Indonesia untuk melindungi keberagaman hayati dan ekosistem laut sebagai bagian dari warisan nasional yang harus dilestarikan untuk generasi masa depan.²¹ Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,

¹⁹ Maretta Trimirza, et.al., *Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat)*, Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 2 No. 1, 2021. Hlm. 116.

²⁰ Nurbintoro dan Nugroho, *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*. Indonesian Law Review Vol. 6, No. 3, Tahun 2019, Hlm. 189-202.

²¹ Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak, dan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan landasan hukum bagi implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Biru di Indonesia, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional

Oleh karena itu, implementasi konsep Ekonomi Biru telah muncul sebagai pendekatan yang penting dalam upaya mencapai *SDGs* ke-14 tentang Kehidupan di Bawah Air di Indonesia. Ekonomi Biru mengusung ide bahwa eksploitasi sumber daya laut dapat berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan, jika dilakukan secara berkelanjutan dan bijaksana. Di Indonesia, Ekonomi Biru memadukan prinsip keberlanjutan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan, termasuk pengelolaan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, dan konservasi ekosistem laut.

Dalam era modern seperti sekarang ini, konsep Ekonomi Biru telah mengemuka sebagai bagian integral dari upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru tersebut adalah ekonomi kelautan berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sambil memastikan kelestarian lingkungan sumber manfaat tersebut dalam jangka

panjang.²² Konsep ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan laut, seperti perikanan, pariwisata, transportasi, dan energi laut. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, Ekonomi Biru memainkan peran penting dalam mempromosikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian *SDGs* yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²³

Konsep Ekonomi Biru pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Belgia, Gunter Pauli, melalui bukunya yang berjudul “*The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs.*” Pada tahun 2010, Pauli mengusulkan perubahan fundamental dalam proses industri untuk mengatasi masalah lingkungan. Ia menekankan pentingnya menggantikan sumber daya energi langka dan mahal dengan teknologi yang lebih sederhana dan bersih. World Bank kini mendefinisikan Ekonomi Biru sebagai penggunaan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, sambil menjaga ekosistem laut yang rentan.²⁴

Ekonomi Biru tersebut dianggap sebagai model ekonomi dan sosial yang baru. Ini berbeda dari model ekonomi saat ini yakni *Red Economy*

²² World Bank dan UN DESA, *The Potential of Blue Economy : Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*; World Bank, Washington D.C., 2017. Hlm. vi. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/523151496389684076/the-potential-of-the-blue-economy-increasing-long-term-benefits-of-the-sustainable-use-of-marine-resources-for-small-island-developing-states-and-coastal-least-developed-countries>

²³ World Bank dan UN DESA, *Ibid.* Hlm. ix.

²⁴ Marihot Nasution, *Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Kajian Literatur*; Jurnal Budget Vol. 7 Edisi 2, 2022. Hlm. 342.

(Ekonomi Merah) yang cenderung merusak lingkungan dan *Green Economy* (Ekonomi Hijau) yang lebih fokus pada energi alternatif. Ekonomi Biru mengambil inspirasi dari alam, memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan berusaha untuk mencapai tujuan “*blue ocean*” dan “*blue sky*,” di mana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sambil menjaga keindahan ekosistem laut. *World Bank* mengidentifikasi komponen Ekonomi Biru, seperti perikanan, pariwisata, transportasi laut, budidaya perairan, energi terbarukan lepas pantai, ekstraktif dasar laut, dan bioteknologi kelautan sebagai elemen-elemen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan ekosistem laut. Konsep Ekonomi Biru telah menjadi topik penting dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut di negara-negara pesisir, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kekayaan laut yang sangat melimpah.²⁵

Melalui Ekonomi Biru, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lautnya sambil menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi kesejahteraan masa depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Ekonomi Biru di Indonesia, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung pencapaian tujuan global dalam upaya menjaga kehidupan di bawah air.

²⁵ Marihot Nasution, *Ibid.* Hlm. 343

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **IMPLEMENTASI *BLUE ECONOMY* UNTUK MENCAPAI *SDGS* KE-14 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**. Penelitian ini akan mendalami sejauh mana konsep Ekonomi Biru telah diterapkan di Indonesia, bagaimana tantangan-tantangan dihadapi, dan dampaknya terhadap pencapaian *SDGs* ke-14. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong implementasi Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Ekonomi Biru dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional?
2. Apa tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji cara Ekonomi Biru dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) ke-14 di Indonesia.
2. Menganalisis tantangan utama yang perlu diatasi dan mengidentifikasi peluang yang ada dalam implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, dan

internet, serta berkonsultasi dengan para ahli di bidang terkait. Penelitian ini adalah karya asli dan bukan hasil penjiplakan dari skripsi atau karya serupa lainnya. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menegaskan keaslian penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari tema penelitian yang sama. Sebagai bukti, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait yang relevan dengan topik penelitian ini, yang telah dikumpulkan sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Marihot Nasution, dengan judul “Potensi dan Tantangan *Blue Economy* dalam Mendukung Petumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara Volume 7 Nomor 2 pada tahun 2022. Masalah yang diangkat di dalam jurnal ini adalah seberapa besar kontribusi sektor pendukung ekonomi biru Indonesia bagi perekonomian, tantangan pengembangan ekonomi biru di Indonesia, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi biru bagi perekonomian berkelanjutan di Indonesia. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa potensi ekonomi biru Indonesia, terutama dalam sektor perikanan dan akvakultur, sangat besar, namun sektor energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi belum sepenuhnya dimaksimalkan. Tantangan terbesar meliputi overfishing, kurangnya daya tampung unit pengolahan pangan laut, kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis, risiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan, dan perubahan preferensi konsumen. Upaya pemerintah termasuk zonasi laut, regulasi, penegakan hukum, koordinasi stakeholder, dan kerjasama internasional. Studi mendatang perlu

mengkaji dampak sektor-sektor ekonomi biru secara kuantitatif, baik secara regional maupun nasional, serta mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan pengembangan sektor-sektor tersebut bersifat berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Wulfram Ervianto dengan judul “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah apakah kekayaan laut tersebut telah mampu didayagunakan sebagai modal pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bangsa, atau kalau pun sudah didayagunakan, sudahkah memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa dalam sektor konstruksi, penting menerapkan prinsip Ekonomi Biru, meski masih ada hambatan seperti minimnya kesadaran dan pengetahuan pekerja. Kurangnya inisiatif pengusaha untuk memberikan pelatihan menyebabkan pekerja mengandalkan pengalaman tanpa pengetahuan yang memadai. Diperlukan mekanisme pelatihan sebelum pekerjaan dimulai untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja konstruksi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Fikri Asy’ari, Ghina Hana Zafira, Fathul Jawad, dan Rizal A. Hidayat dengan judul “Implementasi *Blue Economy* di Indonesia Melalui *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI - CFF)*”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2, Juni 2023. Masalah yang diangkat dalam jurnal

ini adalah “Bagaimana Indonesia mengimplementasikan *Blue Economy* dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan biota laut melalui *CTI-CFF*?” Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan *Blue Economy* melalui teknologi dan program-program yang memanfaatkan sumber daya laut dengan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerja sama multilateral dan program-program pesisir seperti tambak garam, *Biofloc*, konservasi *Mangrove*, budidaya ikan, dan perlindungan biota laut. Tujuannya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Meski ada hambatan, Indonesia berharap dapat mengatasi mereka dan memperkuat aspek-aspek yang masih jadi kendala dalam pelaksanaan *Blue Economy*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, dan Mohammad Agung Nugraha dengan judul “Penerapan *Blue Economy* Dengan Budidaya Udang *Vaname* (*Litopenaeus vannamei*)”, Jurnal of Tropical Marine Science Volume 5 Nomor 1, Tahun 2022. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah “Bagaimana menerapkan konsep *Blue Economy* dengan mengimplementasikan budidaya udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) pada kolam terpal bioflok?”. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa penerapan *Blue Economy* dalam budidaya udang *Vaname* pada kolam terpal bioflok membutuhkan kebijakan pemerintah yang konsisten. Fokus kebijakan tersebut harus diprioritaskan pada ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya laut. Pengukuran parameter standar seperti oksigen terlarut, amonia, nitrit, nitrat, fosfat, kecerahan, suhu, salinitas, dan pH perairan menjadi

penting untuk memastikan kualitas air yang mendukung budidaya yang berkelanjutan. Pelaksanaan budidaya ini, yang melibatkan inovasi teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan probiotik *Probio_FmUBB*, memiliki potensi untuk meningkatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, memberikan produk sehat, mendukung usaha skala rumah tangga, dan membuka akses pasar. Oleh karena itu, pengukuran data kualitas air yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan budidaya ini dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan lingkungan.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, dan Nadya Triyana dengan judul “Strategi Pengembangan *Blue Economy* Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Neo Respublica Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah gambaran terkait dengan aspek tata Kelola pemerintahan terkait dengan pengembangan blue economy di wilayah yang menggantungkan banyak harapan dari geostrategis perbatasan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, melaksanakan Agenda *SDGs* dengan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, akademisi, LSM, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Pemerintah fokus pada kategori rentan dan disabilitas, termasuk anak, wanita, dan pemuda. Pendekatan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Provinsi Kepulauan Riau menjadi pelopor dalam implementasi *SDGs* di tingkat nasional, terbukti dengan

ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 757 Tahun 2017 yang membentuk Tim Koordinasi Daerah untuk *SDGs*. Provinsi ini telah mengimplementasikan program *SDGs* melalui kebijakan dan rencana strategis, termasuk pengelolaan sumber daya laut dan pengawasan melalui program kerja oleh Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Salsabilla Raihan Daulay, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep *Blue Economy* Dalam Mewujudkan *SDGs* Desa (Studi kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)” pada tahun 2022. Masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana perkembangan potensi ekonomi sumber daya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, apa saja indikator yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat, serta Bagaimana tahapan pembuatan *Blue Print* pembangunan ekonomi *Waterfront Village* di Desa Perlis dan Kelantan. Kesimpulan skripsi tersebut adalah bahwa wilayah pesisir Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan strategi yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi Blue Economy. Namun, sosialisasi yang nyata tentang program Blue Economy masih kurang dilakukan, sehingga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Langkat menjadi krusial. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan seharusnya mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui diversifikasi kegiatan kelautan dan

perikanan, dengan tetap memastikan perlindungan lingkungan. Hasil estimasi model menunjukkan pengaruh variabel SK (Sumber Daya Kelautan) secara positif dan signifikan, sementara variabel TB (Tingkat Pendidikan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Meskipun variabel PJ (Pekerjaan) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IDM secara simultan. *Blue print* Desa Perlis dan Kelantan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan, meningkatkan pelayanan dasar di pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata, serta mengurangi kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Hani Mukaromah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ilmu Ekonomi, dengan judul “Implementasi *Blue Economy* Pada Sektor Kelautan Di Surabaya” pada tahun 2023. Masalah yang diangkat dalam skripsi tersebut mengenai implementasi Ekonomi Biru pada sektor kelautan di Surabaya serta kendala dari implementasi Ekonomi Biru tersebut. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah bahwa implementasi *blue economy* pada sektor kelautan telah berlangsung dengan baik, terfokus pada prinsip Efisiensi Alam, Kepedulian Sosial, dan Multiple Revenue. Namun, kendala yang dihadapi termasuk sumber daya laut yang berkurang dan masalah limbah hasil pengasapan ikan. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan menyediakan sarana perikanan, memberikan bibit, dan menerapkan teknologi tepat guna. Namun, kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan, dan solusi

dilakukan melalui penyuluhan, sarana kebersihan, serta penanganan pedagang liar untuk mengatasi masalah limbah.

No	Judul dan Jenis Penelitian	Unsur Perbedaan
1.	Jurnal yang ditulis oleh Marihot Nasution, dengan judul “Potensi dan Tantangan <i>Blue Economy</i> dalam Mendukung Petumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara Volume 7 Nomor 2 pada tahun 2022.	<p>Jurnal tersebut membahas potensi dan tantangan Ekonomi Biru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi Ekonomi Biru untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGS</i>) ke-14 di Indonesia.</p>
2.	Jurnal yang ditulis oleh Wulfram Ervianto dengan judul “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia” pada tahun 2018.	<p>Jurnal tersebut membahas pendekatan Ekonomi Biru mengenai infrastruktur di Indonesia.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada implementasi Ekonomi Biru untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGs</i>) ke-14 di Indonesia.</p>
3.	Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Fikri Asy’ari, Ghina Hana Zafira, Fathul Jawad, dan Rizal A. Hidayat, dengan judul “Implementasi <i>Blue Economy</i> di Indonesia Melalui <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI - CFF)</i> ”, pada tahun 2013.	<p>Jurnal tersebut fokus pada implementasi Ekonomi Biru di Indonesia dengan menekankan keterlibatan <i>Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI - CFF)</i>.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus</p>

		implementasi Ekonomi Biru secara keseluruhan di Indonesia dengan tujuan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>SDGs</i>) ke-14.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Sudirman Adibrata, Rahmad Lingga, dan Mohammad Agung Nugraha, dengan judul “Penerapan <i>Blue Economy</i> Dengan Budidaya Udang <i>Vaname (Litopenaeus vannamei)</i> ” pada tahun 2022.	<p>Jurnal tersebut berfokus pada studi kasus spesifik yang melibatkan udang <i>Vaname</i> dengan menerapkan konsep Ekonomi Biru. Sehingga yang dibahas adalah aspek-aspek teknis dan praktis dari budidaya tersebut, seperti teknologi yang digunakan, pengolahan sumber daya, dan dampak lingkungannya.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas implementasi Ekonomi Biru secara keseluruhan di Indonesia dengan tujuan mencapai <i>SDGs</i> ke-14. Skripsi ini melibatkan analisis kebijakan dan tinjauan terhadap berbagai sektor ekonomi biru di Indonesia.</p>
5.	Jurnal yang ditulis oleh Dhani Akbar, Ryan Anggria Pratama, Yudhyo, Riama Lisnawati Sianturi, Nadya Triyana dengan judul “Strategi Pengembangan <i>Blue Economy</i> Wilayah Perbatasan	Jurnal tersebut memfokuskan pada strategi pengembangan <i>Blue Economy</i> di wilayah perbatasan Indonesia, terutama di Kepulauan Riau seperti tantangan dan peluang pada wilayah

	Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau”, pada tahun 2022	tersebut serta tata kelola ekonomi maritim pesisir Kepulauan Riau secara khusus. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mencakup implementasi <i>Blue Economy</i> di seluruh Indonesia dengan fokus pada mencapai <i>SDGs</i> ke-14. Fokusnya mencakup seluruh kelautan di Indonesia.
6.	Skripsi yang ditulis oleh Salsabilla Raihan Daulay, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan <i>SDGs</i> Desa (Studi kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)” pada tahun 2022.	Skripsi yang ditulis oleh Salsabilla Raihan Daulay memfokuskan pada studi kasus di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat yang mana berpusat pada potensi ekonomi lokal dan penerapan Ekonomi dalam wilayah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki cakupan yang lebih luas, membahas implementasi Ekonomi Biru di seluruh Indonesia dalam pencapaian <i>SDGs</i> ke-14.
7.	Skripsi yang ditulis oleh Hani Mukaromah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Implementasi <i>Blue Economy</i> Pada Sektor Kelautan Di Surabaya” pada tahun 2023	Skripsi yang ditulis oleh Hani Mukarohmah berfokus pada skala kota, melibatkan data dan studi kasus dari Surabaya serta mengaitkan praktik konsep Ekonomi Biru di Surabaya.

		Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi Ekonomi Biru di Indonesia untuk mencapai tujuan <i>SDGs</i> ke-14.
--	--	---

Berdasarkan penjelasan tentang keaslian penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini meneliti tentang apakah Ekonomi Biru dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan *SDGs* ke-14 di Indonesia serta apa tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi Ekonomi Biru dalam menjaipai tujuan *SDGs* ke-14 tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Ekonomi Biru

Untuk menggambarkan konsep mengenai ekonomi biru, sudah terdapat beberapa studi yang sudah dilakukan. Pertama, menurut Phelan, *et. al.*, Ekonomi biru merujuk pada ide menghasilkan kekayaan melalui kegiatan yang terkait dengan lautan sambil secara simultan melindungi dan mendukung ekosistem laut;²⁶ Kemudian menurut Schutter dan Hicks, Ekonomi biru tersebut merupakan konsep yang berupaya meminimalkan kerugian dalam keanekaragaman hayati sambil mendorong pertumbuhan

²⁶ Phelan A., Ruhanen L., dan Mair J., *Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism : Towards An Equitable And Sustainable Blue Economy*. Journal of Sustainable Tourism Vol. 28 No. 10, 2020. Hlm. 1665.

ekonomi, dengan cara menggabungkan aspek lingkungan dan ekonomi;²⁷ Selanjutnya, menurut Prayuda dan Sary, Ekonomi biru adalah konsep inovatif yang mendukung pemanfaatan ekonomi berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada karbon, sehingga mengurangi saling ketergantungan antara ekosistem dan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah mengatasi dampak negatif, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global, yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi;²⁸

Dari beberapa definisi konsep Ekonomi Biru di atas, maka dapat dimaknai bahwa konsep Ekonomi Biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang berbasis pada sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memastikan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Ekonomi Biru juga bertujuan untuk mempromosikan inklusi sosial dan pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ekonomi biru melibatkan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Konsep ini menekankan pentingnya koordinasi antar sektor dalam mengelola dampak terhadap sumber daya laut. Pendekatan ini melibatkan

²⁷ Schutter M. S. dan Hicks C.C., *Networking The Blue Economy In Seychelles : Pioneers, Resistance, And The Power Of Influence*. Journal of Political Ecology Vol. 26 No. 1, 2019. Hlm. 425

²⁸ Prayuda R. dan Sary D. V., *Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Indonesian Journal of International Relations Vol. 3 No. 2., 2019. Hlm. 46

dan pesisir yang berkelanjutan. Sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan inklusi sosial dan pengurangan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.³¹

2. Upaya dan Kebijakan Pemerintah Terkait Ekonomi Biru

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan Ekonomi Biru sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir, serta memastikan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Berikut adalah beberapa upaya dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait Ekonomi Biru :

a. Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kebijakan ini mencakup pengelolaan berbasis pada hak pengguna dan pengelolaan berbasis pada ekosistem. Dalam pengelolaan berbasis pada hak pengguna, pemerintah memberikan hak pengelolaan kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam pengelolaan berbasis pada ekosistem, pemerintah

³¹ Gunawan A. W., et. al., Blue Economy: Konsep dan Implementasi di Indonesia, Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology Vol. 12, No. 1, 2019. Hlm. 1-10.

memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem laut.³²

b. Program Indonesia *Sustainable Oceans (ISO)*

Program Indonesia *Sustainable Oceans* (selanjutnya disebut *ISO*) adalah program yang didukung oleh *World Bank* untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berkelanjutan di sektor kelautan dan pesisir di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat koordinasi untuk menginformasikan strategi dan rencana pengelolaan lautan Indonesia secara berkelanjutan, mengurangi sampah laut, dan memperkuat sumber daya pesisir. *ISO* bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, masyarakat lokal, akademisi, LSM, dan donor untuk mengembangkan pengetahuan, membangun kapasitas, dan mendanai investasi di lapangan untuk mencapai tujuan tersebut.³³

Salah satu proyek yang dilaksanakan oleh *ISO* adalah *Oceans for Prosperity* (atau Laut untuk Kesejahteraan/LAUTRA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan total dana US\$210 juta dari World Bank, termasuk hibah dari *PROBLUE Multi-Donor Trust Fund* dan Pemerintah Kanada, melalui *Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resources Multi-Donor*

³² Lukman Adam dan Ade Surya, *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia*, <https://jurnal.dpr.go.id/>, 2013. Hlm 195-209.

³³ World Bank, *Program Indonesia Sustainable Oceans*, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

Trust Fund (Oceans MDTF). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan dan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.³⁴

c. *Blue Economy Development Framework*

Blue Economy Development Framework adalah kerangka kerja yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2021 untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi *Covid-19*. Framework ini mencakup empat pilar utama, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, pengembangan sektor kelautan dan pesisir, pengembangan infrastruktur kelautan, dan pengembangan kapasitas dan inovasi.³⁵

Pilar pertama dari *Blue Economy Development Framework* adalah pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan dan program yang berfokus pada konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Pilar kedua adalah pengembangan sektor kelautan dan pesisir, yang mencakup pengembangan sektor perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan

³⁴ World Bank, *Ibid.* <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program> diakses pada 29 Oktober 2023

³⁵ BAPPENAS, *Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation*, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

berbasis kelautan. Pilar ketiga adalah pengembangan infrastruktur kelautan, yang mencakup pengembangan pelabuhan, jalan raya laut, dan jaringan transportasi laut. Pilar keempat adalah pengembangan kapasitas dan inovasi, yang mencakup pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pengembangan inovasi teknologi untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir.³⁶

3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Untuk memahami prinsip pembangunan berkelanjutan, sudah terdapat beberapa studi yang sudah dilakukan. Pertama, menurut Sutrisno Hadi, pembangunan berkelanjutan terdiri atas empat prinsip utama yakni :³⁷

1. Prinsip keterpaduan (*integration principle*) yakni Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
2. Prinsip partisipasi (*participation principle*): Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan;
3. Prinsip konservasi (*conservation principle*): Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan konservasi sumber daya alam dan lingkungan agar dapat dipergunakan oleh generasi masa depan;

³⁶ BAPPENAS, *Ibid.* <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ> diakses pada 15 oktober 2023

³⁷ Sutrisno Hadi, *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

4. Prinsip pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs principle*):

Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia dan diolah secara efektif dan efisien, tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Sejarah dari prinsip pembangunan berkelanjutan dimulai pada tahun 1987 ketika Komisi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme/UNEP*) mengeluarkan laporan berjudul “*Our Common Future*” atau yang dikenal juga dengan nama *Brundtland Report* (Laporan Brundtland).³⁸ Laporan tersebut memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.³⁹

Pada tahun 1992, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and*

³⁸ Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bantul: GENTA Publishing, 2022. Hlm. 36.

³⁹ Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm. 7. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <http://eprints.unm.ac.id/15332/1/Sustainable%20Development%20Buku.pdf>

Development/UNCED) diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini menghasilkan dokumen “Agenda 21” yang berisi rekomendasi dan tindakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini juga menghasilkan dua dokumen penting, yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim) dan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).⁴⁰

Kemudian pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi 17 *SDGs* yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang. Salah satu tujuan tersebut adalah *SDGs* ke-14, yaitu “*Life Below Water*” (Kehidupan di Bawah Air).

4. Pentingnya *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-14

Tujuan dari *SDGs* ke-14 adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini mencakup berbagai sasaran, seperti mencegah dan mengurangi pencemaran laut, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, dan meningkatkan

⁴⁰ Wahyu Nugroho, *Op. Cit.*, Hlm. 43-81.

pengetahuan ilmiah dan mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan.⁴¹

Untuk mencapai tujuan *SDGs* ke-14, diperlukan upaya untuk mengurangi polusi laut dan memperbaiki kualitas air laut, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan ekosistem laut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengurangan limbah plastik, dan pengurangan dampak perubahan iklim pada ekosistem laut. Selain itu, keberhasilan implementasi *SDGs* ke-14 juga dapat diukur melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.⁴²

Beberapa target *SDGs* ke-14 yang ingin dicapai secara global antara lain melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, mengurangi polusi laut dan limbah plastik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.⁴³

Sehingga, tujuan *SDGs* ke-14 sangat relevan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan memiliki sumber daya laut yang sangat besar. Namun, sumber

⁴¹BAPPENAS, *SDGs Tujuan 14*, diakses pada 30 September 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>

⁴² PBB, *Goal 14 : Life Below Water – United Nations Sustainable Development*, 2022, diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-14-life-below-water/>

⁴³ IPB Outscs, *Sustainable Development Goals : Life Below Water and Life on Land*, 2023, diakses pada 9 Oktober 2023 dari https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/XGc13fqehiI2wPxI4dRhLMJkgKuhfEqngc59Xk3W.pdf

daya laut Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pencemaran laut, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir sangat penting bagi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencapai *SDGs* ke-14. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mempromosikan pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan pesisir, serta memastikan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut. Beberapa upaya dan kebijakan tersebut antara lain adalah Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem, Program *Indonesia Sustainable Oceans (ISO)*, dan *Blue Economy Development Framework*.⁴⁴

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan penulis sertakan dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk

⁴⁴ M. Nasution, *Challenges of the Blue Economy in Supporting Economic Growth in Indonesia: Literature Review*. Jurnal Budget Vol. 3 No. 1, 2023. Hlm. 1-10.

meningkatkan kesejahteraan hidup dan menyelamatkan lingkungan pesisir dan laut.⁴⁵

2. *SDGs* atau *Sustainable Development Goals* adalah dokumen kesepakatan pembangunan global untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015.⁴⁶
3. *SDGs* ke-14 adalah salah satu dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, oseanografi, serta ekosistem laut dan pesisir untuk mengurangi polusi laut, memperkuat kapasitas pengelolaan perikanan, mempromosikan konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya laut, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.⁴⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data

⁴⁵ Gunter Pauli, *Blue Economy : A New Pathway to Sustainable Development*, New Mexico: 2010. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.scribd.com/doc/31043198/Gunter-Pauli-The-Blue-Economy>

⁴⁶ Ngoyo M. F., *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*, Jurnal Sosioreligius Vol. 1, No. 1, 2015. Hlm. 77-88.

⁴⁷ BAPPENAS, *Tujuan SDGs Ke-14: Ekosistem Lautan*, 2023, diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>

sekunder sebagai sumber informasi utama untuk diteliti, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan memberikan rekomendasi atau solusi atas permasalahan hukum relevan yang sedang dihadapi.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Di dalam pendekatan normatif, penulis melakukan pendekatan melalui sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat *comperhensive, all-inclusive, dan sistematic*.⁴⁹

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini ni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum

⁴⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140020>

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; Mataram University Press, 2020. Hlm. 56. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁵⁰

c) Pendekatan Historis

Pendekatan ini Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁵¹

d) Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.⁵² Negara yang akan dikomparasikan dengan Negara Indonesia adalah Negara Norwegia (negara maju) dan Mauritius (negara berkembang).

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek-aspek yang akan dikaji dari dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diteliti adalah implementasi konsep Ekonomi Biru di Indonesia untuk mencapai tujuan dari *SDGs* ke-14.

⁵⁰ Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 57.

⁵¹ Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 57

⁵² Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 57.

4. Sumber Data Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵³

Peraturan perundang-undangan terkait seperti :

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982
2. *Convention on Biological Diversity (CBD)* Tahun 1993.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

⁵³ Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 59.

Dengan mengaji peraturan-peraturan terkait, penelitian dapat memahami kerangka hukum yang membentuk kebijakan dan praktik-praktik terkait Ekonomi Biru serta bagaimana hal ini berkaitan dengan pencapaian *SDGs* ke-14 di Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.⁵⁴

Bahan hukum sekunder ini memberikan pemahaman mendalam tentang interpretasi, implementasi, dan dampak hukum yang relevan mengenai Ekonomi Biru, serta memberikan wawasan tentang isu-isu hukum yang mungkin muncul dalam implementasi Blue Economy di Indonesia.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

⁵⁴ Muhaimin, *Ibid.* Hlm. 60.

hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁵⁵

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang bertujuan untuk mengolah dan mengorganisasi data secara sistematis dan rasional dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Ada dua jenis analisis data, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yang sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yang sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan permasalahan yang diteliti adalah analisis kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumen, lalu memahami dan menguraikannya untuk menjawab dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

⁵⁵ Muhaemin, *Ibid.* Hlm. 62

⁵⁶ Muhaemin, *Ibid.* Hlm. 104

Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, akan dibahas landasan teori mengenai Ekonomi Biru, Tujuan *SDGs* ke-14, teori-teori terkait implementasi Ekonomi Biru, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Tinjauan pustaka ini akan memberikan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan disajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab pendahuluan. Hasil penelitian ini akan dianalisis secara mendalam dan dibahas sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dibangun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini, saran-saran untuk penelitian selanjutnya, dan refleksi penulis terhadap keseluruhan penelitian ini. Bab penutup ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman tentang implementasi Ekonomi Biru untuk mencapai *SDGs* ke-14 di Indonesia serta arah penelitian yang mungkin diambil di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

United Nations Framework Convention on Climate Change 1992.

Convention on Biological Diversity 1994.

Paris Agreement 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta .

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Buku

World Bank dan UN DESA, *The Potential of Blue Economy : Increasing Long-Term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*; World Bank, Washington D.C., 2017. Hlm. vi. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/523151496389684076/the-potential-of-the-blue-economy-increasing-long-term-benefits-of-the-sustainable-use-of-marine-resources-for-small-island-developing-states-and-coastal-least-developed-countries>

World Bank, *Ocean For Prosperity*, World Bank Group, 2021. Hlm. 30-31. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35377/Ocea>

ns-for-Prosperity-Reforms-for-a-Blue-Economy-in-Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

World Bank, Program Indonesia Sustainable Oceans, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

Sutrisno Hadi, Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Wahyu Nugroho, Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bantul: GENTA Publishing, 2022.

Nurlita Pertiwi, Implementasi Sustainable Development di Indonesia, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. Hlm. 7. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <http://eprints.unm.ac.id/15332/1/Sustainable%20Development%20Buku.pdf>

Sudaryono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1140020>

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram; Mataram University Press, 2020. Hlm. 56. Diakses pada 9 Oktober 2023 dari <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Humphrey Wangke, Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, Tahun 2021

Ramli Utina dan Dewi Wahyuni, Ekologi dan Lingkungan Hidup, Gorontalo : Penerbit, 1999. Hlm 38. Diakses pada 12 Desember 2023 dari https://www.academia.edu/62723837/EKOLOGI_dan_LINGKUNGAN_HIDUP

Syamsu Rijal, et. al., Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Blue Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan : Global Aksara Pers, 2022

Zidny Nafi Hasbi, Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta: Penerbit Jejak Pustaka, Tahun 2022.

- Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Hlm. 129. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=662739>
- Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bantul: GENTA Publishing, 2022
- United Nations, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, United Nations, Tahun 2015.
- Sakti Wahyu Trenggono, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan*, Amafrad Press: Jakarta. Tahun 2023.
- Sakti Wahyu Trenggono, et.al., *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan*, Amafrad Press: Jakarta. Tahun 2023.
- Norwegian Ministry of Climate and Environment, *Norway's Integrated Ocean Management Plans*, Norwegian Ministry of Climate and Environment. Tahun 2020. Hlm. 50, diakses dari <https://www.regjeringen.no/contentassets/5570db2543234b8a9834606c33caa900/en-gb/pdfs/stm201920200020000engpdfs.pdf>

Jurnal

- E Djunarsjah dan AP Putra, *The concept of an archipelagic Province in Indonesia*, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 777 012040, Tahun 2021.
- Veron, J. E. N., & Stafford-Smith, M, *Corals of the World*. Australian Institute of Marine Science, 2000.
- Judianto dan Yessy Eka, *Makalah Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman Goals 14 Ekosistem Laut*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021.
- Yuliani, et. al, *Analisis Konten "Blue Economy" Pada Buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP*, Jurnal Pendidikan IPS Vol. 13 No. 1, 2023.
- Pauly, D., & Zeller, D. *Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining*. Nature Communications, 2016, Vol 7. No. 10244.
- Teh, L. S. L., & Sumaila, U. R. *Contribution Of Marine Fisheries To Worldwide Employment*. Fish and Fisheries, Vol. 14 No. 1, 2013.

- Hughes, T. P., et al. Global warming and recurrent mass bleaching of corals. *Nature Journal* Vol. 543 No. 7645. 2017
- Jambeck, J. R., et al., Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. *Science*, Vol. 347 No.6223, 2015.
- Law, K. L., et al. Plastic Accumulation In The North Atlantic Subtropical Gyre. *Science*, Vol 329 No.5996, 2010.
- Maretta Trimirza, et.al., Perlindungan Terumbu Karang Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kerusakan Terumbu Karang oleh Kapal Pesiar M.V. Caledonian Sky di Raja Ampat), *Uti Possidetis: Journal of International Law* Vol. 2 No. 1, 2021.
- Nurbintoro dan Nugroho, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. *Indonesian Law Review* Vol. 6, No. 3, Tahun 2019.
- Marihot Nasution, Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Kajian Literatur; *Jurnal Budget* Vol. 7 Edisi 2, 2022.
- Phelan A., Ruhanen L., dan Mair J., Ecosystem Services Approach for Community-Based Ecotourism : Towards An Equitable And Sustainable Blue Economy. *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 28 No. 10, 2020.
- Schutter M. S. dan Hicks C.C., Networking The Blue Economy In Seychelles : Pioneers, Resistance, And The Power Of Influence. *Journal of Political Ecology* Vol. 26 No. 1, 2019
- Prayuda R. dan Sary D. V., Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations* Vol. 3 No. 2., 2019
- Gunawan A. W., et. al., Blue Economy: Konsep dan Implementasi di Indonesia, *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology* Vol. 12, No. 1, 2019.
- Lukman Adam dan Ade Surya, Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia, <https://jurnal.dpr.go.id/>, 2013.

- M. Nasution, Challenges of the Blue Economy in Supporting Economic Growth in Indonesia: Literature Review. *Jurnal Budget* Vol. 3 No. 1, 2023
- Ngoyo M. F., Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan, *Jurnal Sosioreligius* Vol. 1, No. 1, 2015.
- Lutvia Resta Setyawati, et. al., Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Kota Sabang, *Jurnal Education and Development* Vol. 9 No. 4.
- Hadi Prasutiyon, Paper Review Konsep Ekonomi Biru (Sebuah Potret : Indonesia Bukanlah Jakarta), *Jurnal Ekonomika* Vol.11 No. 2 Tahun 2018.
- Riza Damanik, et. al., Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045, Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), Tahun 2023.
- Hendrik B. Sompotan, Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 22, No.7, Tahun 2016.
- AB Wibowo, Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Magelang, Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, 2014
- Nurlita Pertiwi, Implementasi Sustainable Development di Indonesia, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Schmidt-Traub, et. al., Sustainable Development Report 2019. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Tahun 2019.
- Rumlugun dan Sumputh, A Model of Port Expansion in a Small Island Economy: Case Study of Port Louis Harbor in Mauritius. *Journal of Traffic and Transportation Engineering* Vol. 6 No. 4 Tahun 2018. Hlm. 274-284.
- Nur Said, Menggerakkan Ekonomi Maritin Syari'ah di Indonesia, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Ismail, A., Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan*, Vol. 12, No.2 Tahun 2020.

- Budi Raharjo, Peran Balai Riset Perikanan Laut dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Riset Kelautan*, Vol. 13, No.2 Tahun 2021.
- Setiawan A., Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, Vol. 10, No.2, Tahun 2023.
- Rijal A., Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia: Tinjauan atas Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020. *Jurnal Konservasi Laut*, Vol. 8, No.2, Tahun 2021.
- Patricio J., et.al., Sustainable marine mining: A pioneering approach in Portugal, *Resources Policy* Vol. 59, Tahun 2018.
- Thien Nguyen dan R. Jones, Blue Economy: A Sustainable Development Approach for Coastal and Marine Resource Management. *Journal of Oceanography and Marine Science* Vol. 5 No. 2, Tahun 2020
- Anderson P., et. al., Sustainable Blue Economy: In Search of a Conceptual Framework. *Sustainability*, Vol. 10 No. 10, 3482
- Halwart, M., Cage aquaculture: Regional reviews and global overview. *FAO Fisheries Technical Paper* No. 498, Rome
- R. Hilborn, et.al., Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. *Proceedings of the National Academy of Sciences* Vol. 117 No. 4 Tahun 2020
- Hall dan Gössling, Sustainable maritime transportation and tourism: issues, challenges and opportunities. *Journal of Transport Geography*, Vol. 33 Tahun 2013
- J.E., Higham dan M. Luck, Marine wildlife tourism: understanding and managing the environmental impacts. *Tourism Management* Vol. 70, Tahun 2019.
- T. Thanh dan H. Nguyen, Sustainable Port Development in the Context of Blue Economy: Lessons from Southeast Asia, *Journal of Ocean Engineering and Technology* Vol. 5 No. 1 Tahun 2018

- Zhang Liu dan W. Liu, Blue Economy Development: Challenges and Opportunities in Maritime Infrastructure, *Journal of Maritime Research*, Vol. 37 No. 2. Tahun 2020
- Daniel Pauly dan Dirk Zeller, Catch Reconstructions Reveal That Global Marine Fisheries Catches Are Higher Than Reported And Declining. *Nature Communications*, 10244, Tahun 2016
- Allison dan Ellis, The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine policy*, Vol. 25 No. 5 tahun 2001
- Daniel M. Alongi, Carbon cycling and storage in mangrove forests. *Annual Review of Marine Science* Vol. 6, Tahun 2014.
- Christie P. Dan White A.T., Best practices for improved governance of coral reef marine protected areas. *Coral Reefs* Vol. 26 No. 4, Tahun 2007.
- Budi Setyono., et. al., Blue Economy Development Strategy of Indonesia in the Archipelagic State Perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 23 No. 2 Tahun 2020
- Wahyudin dan Hastuti, The Role of Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Republic of Indonesia in Developing Blue Economy. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22 No. 3 Tahun 2019.
- Dito Prakoso, et.al., Collaborative Research and Development in Maritime and Fisheries Sector: A Case Study of BRSDMKP's Initiatives. *Journal of Oceanic Studies*, Vol. 20, No.3 Tahun 2021
- Susanto A., et.al., Environmental Management in Coastal and Marine Areas: The Role of BPLHD in Indonesia. *Journal of Environmental Studies*, Vol. 25, No.4 Tahun 2022.
- Prasetyo, B., et.al., Peran Otoritas Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Implementasi Ekonomi Biru: Studi Kasus Otorita Indonesia. *Jurnal Studi Pembangunan Daerah*, Vol. 18 No. 2, Tahun 2021
- World Bank, Enhancing International Partnerships for Sustainable Blue Growth: Lessons Learned from Global Initiatives. Washington, DC: World Bank, Tahun 2018.

- Nugraha dan Setiawan, Sustainable Tourism Development in Pulau Seribu: A Case Study of Indonesia Ocean Power House Program Implementation, *Journal of Sustainable Tourism* Vol. 25 No. 8, Tahun 2020.
- Hartoko, et.al., Assessment of the Coastal Sedimentation Rate at Seribu Islands, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 122 No.1, 012034, Tahun 2018
- Situmorang dan Effendi, The Application of Blue Economy Concept for Sustainable Development in the Riau Islands. *Journal of Environmental Management and Tourism* Vol. 10 No. 4 Tahun 2019
- Nugraha dan Setiawan, Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pengembangan Wilayah Kelautan dan Perikanan: Studi Kasus di Kepulauan Riau. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018
- Djalal, T., *Indonesia's Ocean Policy: Current Situation and Future Perspectives. In Indonesian Seas: The Management and Governance of Marine Fisheries*. Springer, Indonesia. 2019
- Prayekti dan Hidayat, Analisis Tantangan dan Respon Kebijakan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Indonesia. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, Vol. 10, No. 2, tahun 2017.
- Purwanto, P.S., *Marine Fisheries Law Enforcement in Indonesia: Challenges and Opportunities*. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2019
- Harahap, R., Overcoming the Challenges of Policy Implementation in the Field of Marine and Fisheries in Indonesia. *Journal of Indonesian Public Administration*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016
- Halim dan Utomo, Sustainable Fisheries Management: Challenges and Opportunities for Indonesia. *Journal of Marine Resources*, Vol. 18. No. 2, Tahun 2020
- Pranowo dan Susanto, Illegal Fishing and Its Impact on Marine Resources: A Case Study in Indonesia. *Marine Policy Review* Vol. 24 No. 3, Tahun 2021

- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Blue Economy Strategy for Sustainable Fisheries Management in Indonesia. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019
- Suryani dan Hidayat, Plastic Pollution in Indonesian Waters: Current Status and Challenges. *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 152, Tahun 2020
- Hidayat dan Wahyudi, Pencemaran Laut di Perairan Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kelautan Indonesia*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020.
- B. Susilo, Climate Change Impacts on Marine Ecosystems: A Case Study of Indonesia. *Journal of Climate Change Research* Vol. 25 No. 3, Tahun 2020
- Nurjayanti dan Wibowo, The Role of Coastal Community Institutions in Achieving Sustainable Coastal Resource Management in Indonesia. *Journal of Environmental Science and Development*, Vol. 5, No.1, Tahun 2019
- Nursanti, D., & Alam, S, Social and Economic Factors of Coastal Communities in Utilizing Marine Resources: Case Study of Coastal Community in Kudat Regency, North Kalimantan Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Tahun 2021
- A. Wibowo dan A. Raharjo, Pembangunan Ekonomi Berbasis Komunitas untuk Masyarakat Pesisir: Pembelajaran dari Indonesia. *Journal of Coastal Development* Vol. 18 No. 2, Tahun 2020.
- Wirawan dan Fitriani, Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Pesisir: Tantangan dan Peluang. *Coastal Studies Review* Vol. 28 No. 3, Tahun 2021.
- A. Prasetyo, Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Laut: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. *Jurnal Konservasi Laut*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020.
- Pusat Konservasi Laut, Strategi Pelibatan Masyarakat untuk Konservasi Laut. Jakarta: Pusat Konservasi Laut, Tahun 2021
- Aditya G., Potensi Sumber Daya Laut Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Sumber Daya Laut*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2020
- A Satria dan H. Kusuma, Innovative Technologies for Sustainable Fisheries Management: Case Studies from Indonesia, *Journal of Marine Technology* Vol. 12 No. 2, Tahun 2020.

- J. Smith dan L. Jones, Satellite-Based Monitoring for Sustainable Fisheries Management: Lessons Learned and Future Directions. *Marine Policy Review*, Vol. 22 No. 4, Tahun 2018
- Setiawan dan Rahman, Investasi Asing Langsung dalam Ekonomi Biru: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. *Journal of Maritime Economics* Vol. 15 No. 3, Tahun 2020
- Siregar dan Utomo, Strategi Peningkatan Pasar Ekspor Produk Kelautan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kelautan* Vol. 18 No. 2, Tahun 2021
- Mulyana dan Susanto, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Peningkatan Kapasitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Indonesia. *Journal of Coastal Development* Vol. 15 No. 2, Tahun 2020.
- Jones, L., & Smith, J., Enhancing Local Capacity for Sustainable Resource Management: Case Studies from Coastal Communities. *Marine Policy Review*, Vol. 21 No. 3, Tahun 2018.

Website

- Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Peta Tematik. Diakses dari <https://www.big.go.id/peta-tematik/pantai> pada 23 September 2023.
- Universitas Islam AN-Nur Lampung, Sumber Daya Kelautan Indonesia : Potensi, Manfaat, dan Tantangan, dikutip dari <https://an-nur.ac.id/blog/sumber-daya-kelautan-indonesia-potensi-manfaat-dan-tantangan.html>
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>
- The Nature Conservancy, Kenaikan Permukaan Laut, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://reefresilience.org/id/stressors/climate-and-ocean-change/sea-level-rise/>
- The London School of Economics and Political Science, What is the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)?, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-the-un-framework-convention-on-climate-change-unfccc/>

United Nations Climate Change, History of the Convention, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention#Essential-background>

Council on Foreign Relations, Global Climate Agreements: Successes and Failures, diakses pada 15 Oktober 2023 dari <https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreements>

Siaran Pers, Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim, diakses pada 15 Oktober 2023 dari https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/298

BAPPENAS, Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation, diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

BAPPENAS, SDGs Tujuan 14, diakses pada 30 September 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>

PBB, Goal 14 : Life Below Water – United Nations Sustainable Development, 2022, diakses pada 9 Oktober 2023 dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/goal-14-life-below-water/>

IPB Outsco, Sustainable Development Goals : Life Below Water and Life on Land, 2023, diakses pada 9 Oktober 2023 dari https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/XGc13fqehiI2wPxI4dRhLMJkgKuhfEqngc59Xk3W.pdf

Gunter Pauli, Blue Economy : A New Pathway to Sustainable Development, New Mexico: 2010. Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://www.scribd.com/doc/31043198/Gunter-Pauli-The-Blue-Economy>

Danur Lambang Pristiandaru, Ekonomi Biru : Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia. Diakses pada 12 Desember 2023 dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/03/170000986/ekonomi-biru--pengertian-tujuan-dan-potensinya-di-indonesia?page=all>

Prinsip Ekonomi Biru, diakses pada 19 Desember 2023 pukul 13.37 dari <https://ekonomibiru.org/prinsip-ekonomi-biru/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Prinsip Pengolahan Limbah yang Baik Bagi Lingkungan, Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/prinsip-pengolahan-limbah-yang-baik-bagi-lingkungan/>

World Bank, Social Inclusion. <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion> diakses pada 23 Oktober 2023.

Kementerian PPN/BAPPENAS, Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia, Modul Ajar 2 Konsep dan Model Bisnis Ekonomi Sirkular, Tahun 2022. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <http://repository.poltekiparmakassar.ac.id/650/1/BUKU%20-%20KEBIJAKAN%20PENGEMBANGAN%20WISATA%20BAHARI%20BERBASIS%20BLUE%20ECONOMY%20DI%20SULAWESI%20SELATAN.pdf>

Danur Lambang Priandaru, Ekonomi Biru : Pengertian, Tujuan, dan Potensinya di Indonesia, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/07/03/170000986/ekonomi-biru--pengertian-tujuan-dan-potensinya-di-indonesia?page=all>

Eri Sutrisno, Indonesia Siapkan Lima Jurus Mengelola Ekonomi Biru, 2023, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum-2023/7556/indonesia-siapkan-lima-jurus-mengelola-ekonomi-biru?lang=1>

BAPPENAS, Bappenas Luncurkan Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-luncurkan-blue-economy-development-framework-for-indonesias-economic-transformation-NNTgJ>

Binus University, Serba-Serbi Blue Economy di Indonesia, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/serba-serbi-blue-economy-di-indonesia/>

The World Bank, Indonesia Sustainable Oceans Programs, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program/news-n-events>

USAID, Indonesia Sustainable Ecosystems Advanced (Sea) Project, diakses dari https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00T71F.pdf

World Bank, Program Indonesia Sustainable Oceans. <https://www.worldbank.org/in/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

PTSMI, Pembangunan Berkelanjutan : Pengertian, Konsep, dan Tujuan, Tahun 2022. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan>

Badan Pusat Statistik, Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2015. Jakarta : Badan Pusat Statistika, Tahun 2015. Hlm 40-58. Diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2015/12/18/deae14f74fb249127ba342cb/indikator-pembangunan-berkelanjutan-2015.html>

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

United Nations Department of Economic and Sosial Affairs, The 17 Goals of SDGs, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://sdgs.un.org/goals>.

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Op. Cit. Diakses dari <https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sejarah Singkat Adanya SDGs, diakses pada 19 Desember 2023 dari <https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tentang>

United Nations, Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources, diakses dari <https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/> pada 5 Januari 2024

UN Environment Programme, GOAL 14: Life below water, diakses dari <https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-14>

Economic Development Board Mauritius, Blue Economy of Mauritius, diakses pada 6 Januari 2024 dari <https://edbmauritius.org>

United Nations, Voluntary National Review 2021, Sustainable Development Goals Knowledge Platform diakses dari <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia>

Vishva Nath Attri, On the Blue Economy: Concepts and Recent Developments in reference to Sustainability and Climate Change (Blue Economy in Mauritius), Tahun 2023 PowerPoint diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBxLbpw9CDAX14jgGHZdJBVwQFn_oECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwtochairs.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FProf%2520Attri.pptx&usg=AOvVaw2uK5v8Yf_cWwcVP55_BtLZ&opi=89978449 pada 6 Januari 2024

Nairobi Convention, Ibid. <https://www.nairobiconvention.org/mauritius-country-profile/ocean-economy-mauritius-country-profile/> diakses pada 7 Januari 2024

High North News, The Paradox of The Blue Economy, diakses dari <https://www.highnorthnews.com/en/paradox-blue-economy#:~:text=In%20Norway%2C%20almost%2070%25%20of,influence%20the%20national%20economy%20significantly> pada 7 Januari 2024

Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Norway's Ocean Strategy: For Innovation, Sustainable Growth and Jobs diakses pada 12 April 2024 dari https://www.regjeringen.no/contentassets/195335e63c0c49c9a4db130c1a3c1e3a/norways_ocean_strategy_2019_web.pdf

Norwegian Ministries, Blue Opportunities : The Norwegian Government's Updated Ocean Strategy, diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://faolex.fao.org/docs/pdf/nor199316.pdf>

Norway, diakses pada 7 Januari 2024 dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html>

Rokhmin Dahuri, Penerapan Ekonomi Islam dalam Blue Economic Dapat Memperbaiki Kegagalan Kapitalisme, Kuliah Islamic Economics Winter Course 2022, Department of Islamic Economics, Fakultas Ekonomi dan Manajemen–IPB University diakses dari <https://www.tokohkita.co/read/20220921/2281/penerapan-ekonomi-islam-dalam-blue-economic-dapat-memperbaiki-kegagalan-kapitalisme> pada 7 Januari 2024

Gunter Pauli, The Blue Economy Diakses dari https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th_cover04.pdf pada 7 Januari 2024.

Danur Lambang Pristiandaru, Mengenal Tujuan 14 SDGs: Ekosistem Lautan, diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/22/080000486/mengenal-tujuan-14-sdgs--ekosistem-lautan> pada 10 Januari 2024.

Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut : Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2018, diakses dari [https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywo](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=)
rds= pada 25 Mei 2024.

Convention on Biological Diversity, Indonesia – Country Profile, diakses dari <https://www.cbd.int/countries/profile?country=id> pada 26 Mei 2024.

Jakarta Rendah Emisi, Perjanjian Paris: Aspirasi Pencegahan Perubahan Iklim Dunia, diakses dari <https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/43/perjanjian-paris-aspirasi-pencegahan-perubahan-iklim-dunia> pada 26 Mei 2024.

Aris Subagiyo, Dampak Perubahan Iklim Pada Kawasan Pesisir Dan Laut, diakses dari <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/catatan-peringatan-hari-bumi-22-april-2017-dampak-perubahan-iklim-pada-kawasan-pesisir-dan-laut/> pada 26 Mei 2024.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://www.kkp.go.id/kebijakan/pembangunan-budidaya-laut-pesisir-dan-darat-yang-berkelanjutan.html> diakses pada 12 April 2024
- GBRMPA (Great Barrier Reef Marine Park Authority), The Great Barrier Reef Outlook Report 2019. Australia: Great Barrier Reef Marine Park Authority. Tahun 2020. Diakses pada 12 April 2024 dari <https://www2.gbrmpa.gov.au/our-work/outlook-report-2019>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pengembangan Ekonomi Biru di Pulau Seribu Jadi Contoh Baik Indonesia pada KTT AIS 2023, diakses dari <https://maritim.go.id/detail/pengembangan-ekonomi-biru-di-pulau-seribu-jadi-contoh-baik-indonesia-pada-ktt-ais-2023> pada 13 April 2024.
- United Nations Environment Programme, Marine Pollution: Causes, Impacts, and Solutions. Nairobi: UNEP Publications, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36965/POLSOLS_um.pdf
- World Bank, Climate Change and Coastal Communities: Adaptation Strategies for Indonesia. Washington DC : World Bank Publications, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-05/15504-Indonesia%20Country%20Profile-WEB_0.pdf
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Strategi Ekonomi Biru: Menuju Pembangunan Inklusif di Masyarakat Pesisir. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2021. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>
- World Bank, Sustainable Development of Marine Resources in Indonesia. Washington, DC: World Bank Publications. 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-sustainable-oceans-program>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inovasi Teknologi di Sektor Maritim: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://kkp.go.id/reformasi-birokrasi/road-map-rb-kkp.html>

Departemen Luar Negeri, Kerja Sama Internasional di Sektor Maritim: Studi Kasus dan Praktik Terbaik. Jakarta: Kementerian Luar Negeri, Tahun 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBL1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xNF9EaXBsb21hc2lfUG9yb3NfTWYyaXRpbS5wZGY=>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Praktik Terbaik dan Rekomendasi Kebijakan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019. Diakses pada 14 April 2024 dari <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=publikasi&i=214>

Ministry and Blue Economy, diakses dari <https://blueeconomy.govmu.org/SitePages/Index.aspx>